Tinjauan Yuridis Terkait Pernikahan Siri di Indonesia Menurut Ius Contitutum

Achmad Thorik

Universitas Islam Syekh-Yusuf
achmadthorik@unis.ac.id

Hasan Hamid Safri

Universitas Islam Syekh-Yusuf
hhsafri@unis.ac.id

Siti Nurholifah

Universitas Islam Syekh-Yusuf
2102010047@students.unis.ac.id

Reyhan Alifrinaldy Lesmana

Universitas Islam Syekh-Yusuf
2002010015@students.unis.ac.id

Sri Jaya Lesmana

Universitas Islam Syekh-Yusuf
sjlesmana@unis.ac.id

Abstract

Siri marriage, as a form of marriage that is not officially recognized in many jurisdictions, has been the subject of debate and concern in society. This research aims to investigate the legal basis, the factors behind unregistered marriages, and

their legal consequences through a qualitative research approach. This study explores the legal basis for unregistered marriage by detailing the views of various religions and laws that apply in various societal contexts. This research also goes in-depth into the factors that encourage individuals or couples to choose serial marriage, including economic, social, and cultural considerations. In addition, this study identifies the legal consequences that may arise as a result of unregistered marriages, including problems related to inheritance, children's rights and legal protection. It is hoped that this study will provide a better understanding of the phenomenon of unregistered marriages, identify the legal challenges faced by couples who choose this path, and provide a basis for deeper policy thinking regarding the protection of individual rights in the context of unregistered marriages.

Keywords: Sirri Marriage, Factors, Legal Consequences

Pendahuluan

Islam menganggap perkawinan sebagai salah satu cara untuk mencapai kedekatan dengan Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, yang menekankan pentingnya perkawinan sebagai cara untuk menjaga kehormatan, membentuk keluarga, dan menjalankan tanggung jawab moral dan sosial. Dalam hal ini, Al-Qur'an juga menekankan bahwa dalam perkawinan, suami dan istri adalah mitra yang harus saling menghormati, saling mendukung, dan berbagi tanggung jawab dalam menjalani kehidupan Bersama¹. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam dianggap sebagai ikatan lahir batin yang diikuti oleh komitmen yang kuat untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis.

Perkawinan dalam Islam dapat berbeda-beda antara budaya dan interpretasi lokal, tetapi nilai-nilai inti seperti keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab tetap merupakan prinsip utama yang

¹ Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

dipegang teguh dalam agama ini². Mencatatkan perkawinan kepada instansi yang berwenang adalah langkah penting dalam mendapatkan jaminan hukum dalam perkawinan, tidak hanya dalam Islam, tetapi juga dalam agama-agama lainnya di Indonesia³. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memberikan dasar hukum yang mengatur prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia⁴.

Pencatatan perkawinan adalah proses resmi di mana perkawinan dicatat dan diakui oleh negara. Ini memberikan kepastian hukum kepada pasangan yang menikah dan memberikan mereka hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum⁵. Beberapa poin penting terkait dengan pencatatan perkawinan di Indonesia. Pencatatan perkawinan memberikan jaminan hukum kepada pasangan. Ini termasuk hak-hak dan kewajiban hukum, seperti hak harta bersama, hak asuh anak, dan perlindungan hukum lainnya

² Hamzah Junaid, "Kajian Kritis Akulturasi Islam Dengan Budaya Lokal," *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 1 (2013): 56-73, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v1i1.6582>.

³ Tengku Keizerina Devi Azwar, Utary Maharany Barus, and Yefrizawati Yefrizawati, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022): 1-13, <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.5781>.

⁴ Nur Wahyu Illahi, "Analisis Yuridis Terhadap Perkara Perceraian Nikah Siri," n.d., <https://doi.org/https://doi.org/10.33752/tjiss.v4i1.4277>; Itsnaatul Lathifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2015), <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1379>.

⁵ Dewa Putu Tagel, "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil," *Vyavahara Duta* 14, no. 2 (2019): 84-98, <https://doi.org/https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1256>.

yang diberikan kepada pasangan yang sah secara hukum⁶. Pencatatan perkawinan juga penting untuk perlindungan hukum perempuan. Perlu memastikan bahwa perempuan memiliki status hukum sebagai istri dan memiliki hak-hak yang diakui secara sah dalam perkawinan⁷. Meskipun pencatatan perkawinan adalah persyaratan hukum, ini juga penting untuk memastikan bahwa perkawinan sesuai dengan keyakinan agama pasangan. Banyak agama memiliki upacara pernikahan khusus yang diakui oleh hukum sipil. Pencatatan perkawinan juga memiliki dampak sosial yang penting. Ini membantu dalam mengumpulkan data statistik perkawinan, mengakses layanan pemerintah yang berkaitan dengan keluarga, dan melindungi hak-hak anak-anak yang lahir dalam perkawinan.

Hukum perkawinan dalam Islam adalah salah satu aspek yang sangat penting dan banyak diterapkan oleh kaum Muslim di seluruh dunia⁸. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, seperti perkawinan dianggap sebagai tindakan ibadah dalam Islam. Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW secara tegas mendorong umat Islam untuk menikah dan menjalani kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan ajaran agama, dianggap sebagai cara untuk melanjutkan keturunan dan mempertahankan umat Islam. Dalam Islam, memiliki anak-anak yang sah dari perkawinan adalah salah

⁶ Febrina Viviana Cathy Roring, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan," *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6155>.

⁷ Okta Nofia Sari, Andi Sari Damayanti, and Reza Hadrian, "Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum," *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 89-108, <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2078>.

⁸ Arisman Arisman, "FATWA MUI TENTANG NIKAH DIBAWAH TANGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 2 (2021): 33-48, <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jhm.v8i2.3079>.

satu tujuan penting⁹. Perkawinan adalah tempat di mana hak dan kewajiban antara suami dan istri diatur secara hukum. Ini mencakup hak-hak seperti nafkah (dukungan finansial), hak asuh anak, dan hak-hak harta bersama.

Sunnah Nabi Muhammad SAW juga mendorong umat Islam untuk menikah dan menjalani kehidupan berkeluarga¹⁰. Contoh dan ajaran beliau dalam kehidupan berumah tangga menjadi panduan bagi banyak Muslim. Islam melarang perbuatan zina (hubungan seksual di luar perkawinan), dan perkawinan adalah cara yang dianggap paling sah untuk menghindari perbuatan tersebut. Perkawinan dalam Islam juga memiliki implikasi sosial yang luas. Ini menciptakan ikatan sosial yang kuat antara keluarga-keluarga dan membantu dalam berbagi tanggung jawab sosial dan ekonomi. Dengan demikian, hukum perkawinan dalam Islam memiliki peran penting dalam kehidupan umat Muslim, dan penerapannya sangat luas di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Hukum perkawinan dalam Islam diatur oleh ajaran-ajaran Al-Qur'an dan hadis, serta dapat bervariasi dalam beberapa aspek berdasarkan perbedaan budaya dan tradisi di berbagai negara Islam. Meskipun ada variasi dalam praktik perkawinan, nilai-nilai inti tentang pentingnya perkawinan dalam agama dan masyarakat Islam tetap kuat. Dengan mencatatkan perkawinan kepada instansi yang berwenang, pasangan memastikan bahwa mereka menjalani perkawinan yang sah secara hukum dan mendapatkan jaminan

⁹ Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v6i11.727>.

¹⁰ Fajarwati Fajarwati, "MEMBANGUN KELUAGA QUR'ANI DI ERA DIGITAL, ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 1-18, <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i2.163>.

hukum yang diperlukan dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini juga sesuai dengan nilai-nilai hukum dan agama yang mengatur perkawinan di Indonesia.

Beberapa spekulasi muncul mengenai mengapa tetap menjalankan pernikahan siri, meskipun memiliki berbagai risiko, masih menjadi opsi yang dipertimbangkan¹¹. Di kalangan orang awam dalam hal hukum dan orang-orang dengan kondisi ekonomi yang terbatas, ada kemungkinan bahwa keterbatasan dana menjadi alasan utama. Oleh karena itu, melalui prosedur yang lebih praktis dan tanpa biaya, mereka dapat melangsungkan pernikahan. Dari sudut pandang agama, mungkin juga ada kekhawatiran terkait dosa dan godaan melakukan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, pernikahan dengan prosedur yang lebih cepat dan dianggap sah dapat memberikan ketenangan spiritual bagi mereka.

Kasus pernikahan sirri dan pernikahan di bawah usia legal bukanlah fenomena baru. Menurut data dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), pada tahun 2012, sekitar 25 persen masyarakat di Indonesia terlibat dalam praktik kawin siri dan perkawinan adat¹². Artinya, pernikahan semacam ini tidak tercatat secara resmi oleh negara. Survei ini dilakukan di 111 desa yang tersebar di 17 provinsi. Beberapa provinsi bahkan memiliki tingkat pernikahan sirri yang cukup tinggi, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 78 persen, Banten dengan 65 persen, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 54 persen.

¹¹ Aidil Alfin and Busyro Busyro, "Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 61-78, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1268>.

¹² Dinni Nurul Pratiwi and Reni Nuraeni, "Pola Komunikasi Pelaku Nikah Sirri Di Kecamatan Telagasari Karawang," *EProceedings of Management* 10, no. 4 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/af.v20i2.12644>.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama di sembilan kabupaten di Indonesia juga menunjukkan bahwa banyak orang menikah secara sirri dan menikahkan anak-anak di bawah usia legal karena adanya tekanan sosial terkait stigma "perawan tua"¹³. Ini terjadi di beberapa kabupaten, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, Kalimantan Selatan, dan Yogyakarta. Anak perempuan sering kali dinikahkan di bawah usia yang diizinkan oleh hukum, dan hal ini sering kali tidak dicatat oleh negara karena tidak memenuhi persyaratan resmi. Padahal, praktik pernikahan sirri dan pernikahan di bawah usia memiliki dampak yang signifikan, baik dari segi hukum maupun kesehatan. Perlu diberikan perhatian lebih lanjut terhadap isu-isu ini dan upaya harus dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan pernikahan yang sah secara hukum dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak.

Penelitian tentang pernikahan siri yang dianggap sah secara agama namun melanggar hukum sipil dapat menggambarkan situasi yang kompleks dan memunculkan banyak permasalahan yang berdampak pada kerugian perempuan. Berikut adalah naratif yang mungkin menggambarkan faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan siri, problematika yang muncul, dan dampaknya pada perempuan. Dalam banyak kasus, pasangan yang memilih pernikahan siri didorong oleh keyakinan agama mereka. Mereka mungkin meyakini bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah aturan agama mereka adalah sah dan diberkati, meskipun pernikahan ini tidak diakui oleh hukum sipil.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yakni, menguraikan pentingnya perkawinan dalam konteks agama Islam

¹³ Muhammad Afriansyah, "Dinamika Hukum Nikah Sirri Di Indonesia Perspektif Hukum Responsif Nonet-Selznick" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/20911/>.

dan bagaimana hal ini terkait dengan hukum, membahas peran pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia, faktor-faktor yang mendorong pernikahan sirri meskipun ada resiko dan masalah hukum yang terlibat serta hal yang dapat mempengaruhi hak Perempuan dan anak, serta pentingnya edukasi Masyarakat tentang kepatuhan terhadap peraturan pernikahan yang sah secara hukum Islam dan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi literatur adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan dari berbagai sumber tertulis mengenai topik pernikahan siri dengan beberapa langkah penting. *Pertama*, identifikasi sumber literatur meliputi sumber hukum diantaranya undang-undang, peraturan pemerintah dan kebijakan yang mengatur pencatatan pernikahan dan status hukum pernikahan siri di Indonesia, Dokumen utama yang dikaji termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sumber akademik diantaranya Artikel jurnal, buku, dan publikasi akademik lainnya yang membahas aspek hukum, sosial, dan budaya dari pernikahan siri. Ini termasuk kajian-kajian yang membahas dampak sosial-ekonomi pernikahan siri serta analisis hukum mengenai pengakuan dan perlindungan hak dalam konteks pernikahan siri dan sumber agama pandangan agama Islam mengenai pernikahan siri, serta pandangan dari berbagai mazhab dan pendapat ulama.

Kedua, pengumpulan data meliputi pencarian literatur dan evaluasi kualitas sumber, Hanya sumber yang diakui sebagai valid dan kredibel, baik dari segi hukum maupun akademik, yang dipilih untuk analisis lebih lanjut. *Ketiga*, analisis literatur meliputi

pengorganisasian data dengan Mengelompokkan informasi berdasarkan tema dan topik yang relevan, seperti dasar hukum pernikahan siri, faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan siri, dan akibat hukum dari pernikahan siri. Sintesis dan Interpretasi dengan Menyintesis informasi dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola dan kesimpulan yang konsisten. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan teori hukum dengan praktik pernikahan siri serta konsekuensi hukumnya.

Keempat, penulisan temuan meliputi pengembangan argumentasi dengan menyusun argumen berdasarkan analisis literatur mengenai relevansi dan implikasi hukum pernikahan siri di Indonesia. Menggunakan data yang diperoleh untuk mendukung atau menolak hipotesis dan menjelaskan fenomena yang ditemukan. Penyusunan laporan dengan menulis bagian diskusi yang mengintegrasikan temuan dari studi literatur ke dalam konteks hukum dan sosial. Menghubungkan hasil dengan tujuan penelitian untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang fenomena pernikahan siri.

Pembahasan

Pengertian Nikah

Pernikahan berasal dari kata al-nikah dan al-ziwaj yang artinya menginjak, menaiki, bersetubuh atau bersenggama, imam syafi'i mendefinisikan pernikahan memiliki makna akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita¹⁴. Nikah memiliki beberapa arti yang dijabarkan oleh para ulama terdahulu,

¹⁴ Alex Kusmardani et al., "Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation," *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 2, no. 4 (2022): 517-28, <https://doi.org/https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1102>.

abu zahra memaknai pernikahan sebagai akad yang menghalalkan seseorang untuk bersenang-senang diantara masing-masing pihak atas dasar agama, namun ada juga yang mengartikan pernikahan adalah suatu bentuk ibadah dimana seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad dengan tujuan meraih kehidupan yang sakinah (tenang, damai), mawaddah (saling mencintai dan penuh kasih sayang) serta warahmah (kehidupan yang dirahmati Allah)

Pengertian dengan berbagai arti tentang pernikahan memberikan tujuan dan maksud yang sama, akad yang memberikan hak antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, selarang dengan pengertian yang dijelaskan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, begitupun pengertian dijabarkan oleh Kompilasi Hukum Islam pada Buku 1 Bab 2 pasal 2 yang mengatakan “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan yang diatur oleh agama memiliki tujuan dan mengandung hikmah yang dibutuhkan dalam tata kehidupan manusia, sebab dengan pernikahan dapat menyatukan dua keluarga yang berbeda karakter, menyatukan dua orang yang berlainan jenis dalam satu ikatan menjadi satu keluarga, selanjutnya akan berkembang menjadi kelompok masyarakat, sesuai dengan tujuan pernikahan yang terdapat pada surat ar-Rum ayat 21. M Quraish Shihab berpendapat pernikahan akan melahirkan ketenangan batin, Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya¹⁵.

¹⁵ Muhammad Al Faruq and Rohmahtus Sholihah, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan*

Pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan¹⁶, rukun pernikahan dalam Islam adalah wali, dua orang saksi, ijab qobul dan dua calon mempelai, sedangkan syarat nikah adalah adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad¹⁷, ada syarat tambahan yang dicantumkan oleh ulama fiqih seperti cakupannya seorang wali, wanita baligh dan berakal, tidak ada penipuan dari masing-masing pihak, tidak adanya cacat. Rukun dan syarat ini menjadi satu kesatuan menjadi sahnya pernikahan, akan tetapi manakala syarat tidak terpenuhi tetap sah akan tetapi akan menjadi celah negatif di masa mendatang.

Nikah Sirri Menurut *Ius Constitutum*

Selama sejarah yang panjang, terdapat catatan yang menunjukkan bahwa perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang subordinative¹⁸. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai mitos yang menggambarkan perempuan dalam cahaya yang merendahkan, dan mitos-mitos ini telah menjadi seperti doktrin yang kuat dalam masyarakat. Salah satu mitos yang penting adalah cerita tentang penciptaan perempuan dan pengusiran Adam dari Surga ke bumi. Dalam cerita ini, Hawa dipercayai diciptakan dari tulang rusuk Adam, sehingga perannya adalah untuk memenuhi keinginan Adam,

Islam 1, no. 4 (2020): 112-30,
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/203>.

¹⁶ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111-22,
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

¹⁷ Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018),
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>.

¹⁸ Gernaida Krisna R Pakpahan and Onnie Lumintang, "PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN DI MASYARAKAT TIMUR TENGAH KUNO," *Diegesis: Jurnal Teologi* 9, no. 1 (2024): 1-30,
<https://doi.org/https://doi.org/10.46933/DGS.vol9i11-30>.

dan Hawa dianggap sebagai penyebab pengusiran Adam dari Surga ke bumi. Mitos ini menciptakan persepsi bahwa perempuan adalah sumber godaan setan, penyebab pelecehan seksual, dan dianggap berbahaya, sehingga harus dikendalikan oleh laki-laki.

Dampak dari mitos-mitos seperti ini adalah pemberian posisi yang lebih rendah kepada perempuan dalam masyarakat. Perempuan sering kali diperlakukan sebagai objek yang harus patuh dan tunduk pada kehendak laki-laki¹⁹. Diskriminasi gender, ketidaksetaraan, dan pelecehan seksual sering kali dapat ditemukan dalam budaya yang memegang teguh mitos-mitos ini. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan ini semakin banyak ditantang dan diperjuangkan oleh gerakan perempuan, aktivis hak asasi manusia, dan individu-individu yang memahami pentingnya kesetaraan gender. Perubahan sosial dan perkembangan budaya telah membantu mengatasi stereotip dan mitos yang merendahkan perempuan, dan upaya terus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih besar di seluruh dunia.

Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, sebagai pedoman bagi masyarakat Islam, prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan diakui secara mendasar. Al-Qur'an mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan dari satu entitas hidup, sehingga tidak ada superioritas yang dimiliki oleh satu gender atas yang lainnya²⁰. Lebih jauh lagi, Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang

¹⁹ Asmanidar Asmanidar, "KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SEJARAH (The Women's Position in Ancient Greece, Athens)(Sekitar Tahun 1050-700 SM)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 2 (2015): 15-26, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i2.786>.

²⁰ Evi Fatimatur Rusydiyah, "Pendidikan Islam Dan Kesetaraan Gender: Konsepsi Sosial Tentang Keadilan Berpendidikan Dalam Keluarga," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2016): 20-43, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jpai.2016.4.1.20-43>.

dapat menggambarkan Hawa memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada Adam. Dengan demikian, prinsip Al-Qur'an terhadap laki-laki dan perempuan adalah kesetaraan, dan hak-hak istri diakui dan sejajar dengan hak-hak suami.

Al-Qur'an sebenarnya menganjurkan pencatatan akad-akad, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan. Namun, mayoritas fuqaha (ahli hukum Islam) menganggap pencatatan ini sebagai anjuran, bukan sebagai kewajiban. Tujuan dari anjuran ini adalah untuk memastikan agar kedua pihak yang terlibat dalam akad tidak lupa dengan komitmen yang mereka buat. Pada masa Rasulullah, tidak ada ketentuan pencatatan perkawinan karena situasi saat itu belum melibatkan banyak kasus pernikahan yang kompleks seperti yang kita lihat saat ini. Namun, dalam perkembangan zaman sekarang, ada tuntutan hukum yang lebih tegas terkait berbagai permasalahan perkawinan. Oleh karena itu, kehadiran dua orang saksi saja dianggap tidak cukup lagi. Mobilitas manusia yang semakin tinggi dan kebutuhan akan bukti autentik telah mengubah pandangan ini²¹. Meskipun secara syariah (hukum Islam), pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam syarat atau rukun nikah, pencatatan ini dianggap sebagai bagian yang penting untuk menghindari potensi kesulitan di masa depan²².

Hal ini diatur dalam undang-undang, seperti dalam Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan hukum agama atau

²¹ Muhamad Isna Wahyudi, "MENUJU HUKUM PERKAWINAN ISLAM PROGRESIF TOWARDS PROGRESSIVE ISLAMIC MARRIAGE LAW," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 59-68, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.59-68>.

²² Teuku Yudi Afrizal, "Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Akibat Hukumnya," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 7 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8278177>.

kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan dalam Pasal 5 (1) dengan mengatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat untuk menjaga ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam. Selain itu, Pasal 6 (2) KHI menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum²³. Ini menunjukkan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari ketertiban hukum perkawinan dalam masyarakat.

Praktik perkawinan dalam masyarakat tidak selalu mengikuti sepenuhnya ketentuan yang ada dalam Undang-Undang. Beberapa proses pernikahan lebih mengacu pada lembaga atau norma yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini perlu diakui karena negara mengakui adanya pluralisme hukum, yang berarti bahwa terdapat berbagai sumber hukum yang diakui secara bersamaan²⁴. Akibatnya, dalam hal hukum keluarga, seringkali keputusan tentang pilihan hukum diberikan kepada individu sebagai hak pribadi. Sebagai contoh, nikah siri adalah salah satu contoh pilihan hukum yang didasarkan pada konteks agama. Dalam hal ini, penekanannya bukan hanya sebatas hubungan hukum semata, tetapi lebih kepada faktor konsekuensi dalam pengamalan ibadah kepada Allah.

Munculnya kasus pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan menjadi sebuah fenomena yang khas. Pernikahan siri adalah sebuah ikatan perkawinan yang, meskipun telah memenuhi syarat-syarat dasar perkawinan seperti ijab, qabul, dua individu yang

²³ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 2017.

²⁴ Baiq Amilia Kusumawarni, "Pluralisme Hukum Dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional Di Indonesia: Kajian Terhadap Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional," *Unizar Recht Journal (URJ)* 1, no. 4 (2022), <https://doi.org/https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/21>.

menjadi pasangan, hadirnya wali, dan dua saksi, namun tidak tercatat resmi di kantor urusan agama karena alasan tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, beberapa kalangan menganggap pernikahan sama cam itu sah karena memenuhi kriteria keabsahan perkawinan.

Nikah siri masih sering dijadikan sebagai alternatif untuk menghindari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, yang secara psikologis, moral, maupun materi belum siap untuk menikah secara resmi. Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga segala hal atau tindakan yang timbul sebagai hasil dari pernikahan adalah tindakan hukum yang memiliki perlindungan hukum. Jika perkawinan tidak tercatat secara resmi, maka segala hal yang terkait dengan konsekuensi pernikahan tidak dapat diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak istri untuk mendapatkan nafkah baik fisik maupun emosional, pengurusan akte kelahiran anak, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak warisan istri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah, dan masih banyak permasalahan lainnya tidak dapat diatasi secara sah menurut hukum.

Bahkan di beberapa negara dari Lembaga fatwa membahas perihal nikah siri tersebut, diantaranya lembaga fatwa Arab Saudi (al-Lajnah al-Daimah) memberi fatwa bahwa hukum Nikah Siri adalah haram dan tidak boleh, karena pernikahan harus diumumkan sebagai pembeda dengan pelacuran, Lembaga fatwa Mesir dan Yordania berpendapat nikah siri ('Urfi) hukumnya sah selama memenuhi rukun dan syaratnya akan harus dicatatkan untuk memenuhi hak-hak pernikahan, sedangkan Lembaga fatwa Kuwait dan Libya berpendapat hukum nikah siri (urfi) hukumnya sah²⁵.

²⁵ Faishal Agil Al Munawar, "Telaah Fatwa Tentang Nikah Siri," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 55-63, <https://doi.org/DOI:10.35316/istidlal.v4i1.210>.

Faktor-Faktor Masih Terjadinya Nikah Sirri

Melihat kasus-kasus pernikahan sirri yang terjadi, masing-masing individu memiliki latar belakang yang spesifik, tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari legitimasi atau keabsahan. Secara umum, pandangan yang dianut adalah bahwa pernikahan sirri sudah dianggap sah dari sudut pandang agama. Sebagian masyarakat masih berpendapat bahwa perkawinan merupakan urusan pribadi yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agama, sehingga tidak memerlukan keterlibatan otoritas yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, pernikahan sirri juga dipandang sebagai solusi bagi pasangan yang ingin menikah tetapi belum siap atau menghadapi hambatan-hambatan lain yang mencegah mereka terikat secara hukum. Terjadinya pernikahan sirri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan sirri meliputi:²⁶

1. Keterbatasan Ekonomi

Beberapa pasangan mungkin tidak mampu membiayai pernikahan yang resmi dan mahal. Oleh karena itu, mereka memilih pernikahan sirri sebagai alternatif yang lebih ekonomis.

2. Hambatan Sosial atau Budaya

²⁶ Edi Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (2013), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v11i1.163>; Alviro Mulya and Elimartati Elimartati, "Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (2022): 511-19; Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 104-12, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267>; M Thahir Maloko, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 3 (2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v1i3.275>.

Dalam beberapa kasus, faktor-faktor sosial atau budaya, seperti perbedaan status sosial atau etnis, dapat menjadi hambatan untuk pernikahan resmi. Pernikahan siri bisa menjadi cara untuk mengatasi hambatan tersebut.

3. Pengakuan Agama Beberapa individu atau pasangan mungkin merasa bahwa pernikahan siri lebih sesuai dengan keyakinan agama atau spiritual mereka, dan mereka percaya bahwa pernikahan ini sudah sah dari sudut pandang agama.
4. Keinginan untuk Privasi Beberapa pasangan mungkin menginginkan privasi dalam kehidupan pernikahan mereka dan merasa bahwa pernikahan siri memberi mereka lebih banyak kendali atas urusan pribadi mereka.
5. Kondisi hukum dan birokrasi-birokrasi yang rumit atau hukum yang membingungkan dalam suatu negara dapat membuat beberapa pasangan enggan untuk menikah secara resmi. Mereka mungkin melihat pernikahan siri sebagai pilihan yang lebih sederhana.
6. Kesiapan Psikologis atau Emosional, beberapa pasangan mungkin merasa bahwa mereka belum siap untuk mengambil komitmen pernikahan yang resmi, tetapi mereka ingin menjalani hubungan yang serius. Pernikahan siri dapat dianggap sebagai jalan tengah dalam hal ini.
7. Pengaruh Teman atau Keluarga Tekanan dari teman, keluarga, atau lingkungan sosial tertentu juga dapat mempengaruhi keputusan pasangan untuk menikah secara siri.

8. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka.
9. Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang, mencari pasangan lain.
10. Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina.
11. Faktor belum cukup umur
12. kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan sirri.

Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menikah secara siri dapat bervariasi dari kasus ke kasus, dan setiap situasi memiliki dinamika yang unik. Selain itu, apakah pernikahan siri dianggap sah atau tidak tergantung pada pandangan agama dan hukum yang berlaku di suatu wilayah atau komunitas tertentu.

A. Akibat Hukum Dari Melakukan Nikah Sirri

Pernikahan adalah sebuah peristiwa hukum, sehingga semua konsekuensi yang timbul akibat pernikahan dianggap sah secara hukum²⁷. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam konteks pernikahan siri, yang tidak diakui secara sah oleh hukum di

²⁷ Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16-21, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.

beberapa yurisdiksi, ada ketidakpastian hukum yang bisa muncul. Oleh karena itu, karena pernikahan siri tidak diakui secara hukum, baik suami, istri, maupun anak-anak mereka mungkin tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti yang mereka dapatkan dalam perkawinan yang sah secara resmi.

Masalah-masalah yang timbul dalam pernikahan siri seringkali berakar pada ketidakjelasan status hukumnya. Terkadang, istri dalam pernikahan siri bisa menjadi pihak yang lebih rentan, karena mereka mungkin tidak memiliki hak-hak hukum yang sama seperti yang dimiliki dalam perkawinan resmi. Suami, di sisi lain, mungkin memiliki lebih sedikit kerugian dalam konteks hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami konsekuensi hukum sebelum memutuskan untuk menikah siri. Masyarakat perlu menyadari bahwa pernikahan siri bisa membawa risiko dan ketidakpastian hukum yang dapat memengaruhi hak-hak dan perlindungan yang mereka terima. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan nasihat hukum atau informasi yang sesuai sebelum memasuki pernikahan siri atau pernikahan lainnya yang tidak diakui secara sah oleh hukum.

Penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak anak-anak serta perempuan dalam konteks kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting dalam sebuah masyarakat yang beradab²⁸. Menunjukkan ketidakpedulian terhadap Undang-Undang (UU) perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan hak kesehatan reproduksi perempuan adalah pelanggaran serius yang dapat membahayakan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

²⁸ Agus Setiawan, "Politik Hukum Perlindungan HAM Di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan Di Bidang Kesehatan)," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 77-102, file:///C:/Users/achmad thorik/Downloads/Politik+Hukum+Perlindungan+HAM+di+Indonesia+(Studi+Hak-Hak+Perempuan+di+Bidang+Kesehatan).pdf.

Seorang anak usia 12 tahun seharusnya dilindungi dan diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Masa remaja adalah waktu penting dalam perkembangan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak, termasuk hak untuk bermain, berpendidikan, dan memiliki akses ke informasi yang sesuai usia, dihormati dan dilindungi. Sementara itu, dalam hal kesehatan reproduksi perempuan, perlindungan hak-hak perempuan untuk mengambil keputusan tentang tubuh mereka sendiri dan menerima perawatan kesehatan yang sesuai sangatlah penting. Ketidakpedulian terhadap kesehatan reproduksi perempuan dapat mengakibatkan berbagai risiko kesehatan yang serius. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mematuhi undang-undang yang ada, seperti UU perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan menghormati hak kesehatan reproduksi perempuan. Hal ini harus menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah untuk melindungi hak-hak individu, terutama anak-anak dan perempuan, serta memastikan bahwa undang-undang tersebut ditegakkan dengan tegas untuk kesejahteraan mereka. Pernikahan siri memiliki risiko hukum yang signifikan karena tidak diakui secara resmi dalam banyak yurisdiksi. Berikut adalah beberapa risiko hukum yang dapat muncul jika seseorang memilih untuk melakukan pernikahan siri²⁹:

1. Ketidak-akuan Hukum Pernikahan siri tidak diakui sebagai sah secara hukum di banyak negara atau

²⁹ Lia Apriliani, "Kajian Sadd Al-Dzari'ah Atas Praktik Nikah Siri Di Bumiharjo Kab. Jepara," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 38-56, <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3225>; Nazarudin Nazarudin, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, "Nikah Sirri Dan Problematikanya," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 4736-50, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2215>.

yurisdiksi. Artinya, secara hukum, pasangan tersebut tidak dianggap sebagai suami istri yang sah. Ini dapat berdampak pada hak-hak dan perlindungan hukum yang biasanya diberikan kepada pasangan yang sah secara resmi.

2. Hak Warisan dan Harta Bersama

Dalam pernikahan siri, pasangan mungkin tidak memiliki hak warisan atau hak atas harta bersama seperti yang dimiliki oleh pasangan yang menikah secara resmi. Ini bisa menyebabkan masalah hukum ketika salah satu dari mereka meninggal.

3. Hak-hak Anak

Jika pasangan dalam pernikahan siri memiliki anak, anak-anak tersebut mungkin tidak memiliki status hukum yang jelas. Ini bisa menjadi masalah dalam hal hak asuh, nafkah, dan hak-hak lainnya yang biasanya diatur dalam pernikahan yang sah secara resmi.

4. Perlindungan Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam beberapa yurisdiksi, pasangan dalam pernikahan siri mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dimiliki oleh pasangan yang menikah secara resmi.

5. Hak Kesehatan dan Perawatan Medis

Dalam beberapa kasus, pasangan dalam pernikahan siri mungkin tidak memiliki hak yang sama untuk membuat keputusan medis atau mengakses perawatan kesehatan daripada pasangan yang sah secara resmi.

6. Masalah Kewarganegaraan

Dalam beberapa yurisdiksi, pernikahan siri dapat mengakibatkan masalah kewarganegaraan jika salah satu pasangan adalah warga negara dan yang lainnya bukan. Hal ini dapat mempengaruhi status kewarganegaraan anak-anak mereka juga.

Penting untuk diingat bahwa risiko hukum dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi tempat tinggal masing masing orang, hukum lokal yang berlaku, dan kebijakan pernikahan di wilayah tersebut. Sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan siri, sangat bijaksana untuk mencari nasihat hukum dari seorang ahli hukum yang memahami hukum keluarga dan pernikahan didalam yurisdiksi untuk memahami risiko hukum yang mungkin timbul.

Kesimpulan

Nikah siri menurut hukum positif adalah perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh individu tersebut, dan setiap perkawinan harus didokumentasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, banyak faktor yang menyebabkan mengapa nikah sirri ini tetap banyak dilakukan oleh masyarakat meskipun sudah jelas akibat hukumnya.

Berdasarkan analisis, faktor-faktor yang mendorong praktik pernikahan siri termasuk keterbatasan ekonomi, hambatan sosial atau budaya, serta keinginan untuk menjaga privasi. Meskipun pernikahan siri dapat memberikan solusi bagi beberapa pasangan dalam konteks sosial dan agama, risiko hukum yang menyertainya, seperti ketidakpastian hak warisan, hak asuh anak, dan

perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut.

Rekomendasi penelitian ini adalah perlu adanya Pendidikan dan kesadaran hukum dengan mengedukasi Masyarakat melalui program Pendidikan dan sosialisasi kalaborasi Lembaga agama dan pemerintah, penegakan hukum secara konsisten untuk melindungi hak-hak Perempuan dan anak, menindak lanjuti dengan mengevaluasi kebijakan dan peraturan terkait nikah siri dengan mempertimbangkan dampak terhadap Masyarakat serta memperbaiki regulasi jika diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul, dan penelitian lanjutan bisa melakukan studi kasus dan pengumpulan data lebih mendalam tentang dampak pernikahan siri diberbagai daerah.

Referensi

- Adillah, Siti Ummu. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 104-12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edus.267>.
- Afriansyah, Muhammad. "Dinamika Hukum Nikah Sirri Di Indonesia Perspektif Hukum Responsif Nonet-Selznick." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/20911/>.
- Afrizal, Teuku Yudi. "Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Akibat Hukumnya." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 7 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8278177>.
- Alfin, Aidil, and Busyro Busyro. "Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 61-78.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1268>.
- Apriliani, Lia. "Kajian Sadd Al-Dzari'ah Atas Praktik Nikah Siri Di Bumiharjo Kab. Jepara." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 38-56.
<https://doi.org/https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3225>.
- Arisman, Arisman. "FATWA MUI TENTANG NIKAH DIBAWAH TANGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 2 (2021): 33-48.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jhm.v8i2.3079>.
- Asmanidar, Asmanidar. "KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SEJARAH (The Women's Position in Ancient Greece, Athens)(Sekitar Tahun 1050-700 SM)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 2 (2015): 15-26.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i2.786>.
- Azwar, Tengku Keizerina Devi, Utary Maharany Barus, and Yefrizawati Yefrizawati. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022): 1-13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.5781>.
- Fajarwati, Fajarwati. "MEMBANGUN KELUAGA QUR'ANI DI ERA DIGITAL, ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 1-18.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i2.163>.
- Faruq, Muhammad Al, and Rohmahtus Sholihah. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 112-30.
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/203>.
- Gunawan, Edi. "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (2013).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v11i1.163>.
- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan:*

- Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.
- Illahi, Nur Wahyu. "Analisis Yuridis Terhadap Perkara Perceraian Nikah Siri," n.d.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33752/tjiss.v4i1.4277>.
- Junaid, Hamzah. "Kajian Kritis Akulturasi Islam Dengan Budaya Lokal." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 1 (2013): 56-73.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v1i1.6582>.
- Kusmardani, Alex, Usep Saepulloh, Nurrohman Nurrohman, Aah Tsamratul Fuadah, and Abdulah Syafi'i. "Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 2, no. 4 (2022): 517-28.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1102>.
- Kusumawarni, Baiq Amilia. "Pluralisme Hukum Dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional Di Indonesia: Kajian Terhadap Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional." *Unizar Recht Journal (URJ)* 1, no. 4 (2022).
<https://doi.org/https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/21>.
- Lathifah, Itsnaatul. "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2015).
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1379>.
- Maloko, M Thahir. "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 3 (2014).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jsipakalebbi.v1i3.275>.
- Matnuh, Harpani. "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v6i11.727>.

- Mulya, Alviro, and Elimartati Elimartati. "Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (2022): 511-19.
- Munawar, Faishal Agil Al. "Telaah Fatwa Tentang Nikah Siri." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 55-63. <https://doi.org/DOI: 10.35316/istidlal.v4i1.210>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111-22. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nazarudin, Nazarudin, Achmad Abubakar, and Halimah Basri. "Nikah Sirri Dan Problematikanya." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 4736-50. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2215>.
- Pakpahan, Gernaida Krisna R, and Onnie Lumintang. "PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN DI MASYARAKAT TIMUR TENGAH KUNO." *Diegesis: Jurnal Teologi* 9, no. 1 (2024): 1-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.46933/DGS.vol9i11-30>.
- Pratiwi, Dinni Nurul, and Reni Nuraeni. "Pola Komunikasi Pelaku Nikah Sirri Di Kecamatan Telagasari Karawang." *EProceedings of Management* 10, no. 4 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/af.v20i2.12644>.
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>.
- Roring, Febrina Viviana Cathy. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan." *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6155>.
- Rusydiah, Evi Fatimatur. "Pendidikan Islam Dan Kesetaraan Gender: Konsepsi Sosial Tentang Keadilan Berpendidikan

- Dalam Keluarga.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2016): 20-43.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jpai.2016.4.1.20-43>.
- Sari, Okta Nofia, Andi Sari Damayanti, and Reza Hadrian. “Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum.” *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 89-108.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2078>.
- Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16-21.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.
- Setiawan, Agus. “Politik Hukum Perlindungan HAM Di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan Di Bidang Kesehatan).” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 77-102. [file:///C:/Users/achmadthorik/Downloads/Politik+Hukum+Perlindungan+HAM+di+Indonesia+\(Studi+Hak-Hak+Perempuan+di+Bidang+Kesehatan\).pdf](file:///C:/Users/achmadthorik/Downloads/Politik+Hukum+Perlindungan+HAM+di+Indonesia+(Studi+Hak-Hak+Perempuan+di+Bidang+Kesehatan).pdf).
- Tagel, Dewa Putu. “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.” *Vyavahara Duta* 14, no. 2 (2019): 84-98.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1256>.
- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 2017.
- Wahyudi, Muhamad Isna. “MENUJU HUKUM PERKAWINAN ISLAM PROGRESIF TOWARDS PROGRESSIVE ISLAMIC MARRIAGE LAW.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 59-68.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.59-68>.